

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Akuntabilitas telah diakui secara luas oleh publik sebagai nilai fundamental yang digunakan untuk menuju tata kelola yang baik di dalam organisasi publik (Aman dkk, 2013). Akuntabilitas merupakan syarat utama untuk reformasi administrasi publik (Bubnick, 2002). Ray (2012) mengklaim bahwa akuntabilitas merupakan salah satu aspek organisasi publik yang berfungsi untuk memastikan jalannya pemerintahan sudah baik dan meningkatkan pemantauan oleh pemangku kepentingan utama.

Dalam beberapa tahun terakhir Akuntabilitas publik semakin mendapat perhatian berbagai kalangan (Fauziah dan Nur, 2017). Hal ini disebabkan oleh perhatian publik yang ditaruh terhadap apa yang dikerjakan oleh organisasi sektor publik, diantaranya adalah pengerjaan program, pelaksanaan kebijakan, proyek, dan aktivitas rutin organisasi sektor publik (Kristian dkk, 2015). Bentuk perhatian yang terjadi merupakan dampak dari pajak dan retribusi yang telah dibayarkan masyarakat dan menjadi hak dan wewenang pemerintah sektor publik atau Pemerintah daerah (Kristian dkk, 2015). Hak dan wewenang yang telah diberikan kepada daerah, memang merupakan sebuah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparansi kepada masyarakat dan pemerintah pusat (Fauziah dan Nur, 2017).

Konsep akuntabilitas sejalan dengan ajaran islam yakni sebagaimana tertuang di Al-Quran dan beberapa Hadis yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ
 أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
 تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah SWT menyuruh mu untuk menyampaikan sebuah amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memberikan hukum kepada antara manusia maka kamu harus menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik baiknya yang memberi pengajaran kepadamau. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat. (Qs. An-Nisa:58)

مَالِكٍ عَنِ مَسْلَمَةَ بِنِ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا
 اللَّهُ عَبْدٌ عَنْ دِينَارِ بْنِ اللَّهِ عَبْدٌ عَنْ
 عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
 وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ أَلَا قَالَ وَسَلَّمَ
 الَّذِي فَالْأَمِيرُ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ
 مَسْئُولٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ رَاعٍ النَّاسِ عَلَى
 عَنْهُمْ

Artinya:

Dari Ibnu Umar Ra dan Nabi SAW sesungguhnya bersabda “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kandungan dalam QS. An-Nisa 58 dan kedua Hadist tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia, untuk memegang teguh dan menjaga amanah yang diamanahkan kepada kita dalam hal apapun apalagi dalam kepemimpinan. Ketika seseorang pemimpin tidak bisa menjaga amanah yang

telah diberikan kepada mereka maka akan dapat menimbulkan kerusakan. Karena pemimpin merupakan penguasa yang bertanggung jawab dalam menjalankan sebuah aturan untuk mengatur rakyat.

Kurniawan (2018) menyatakan untuk menjamin akuntabilitas publik, yaitu diperlukannya penyajian informasi keuangan yang utuh di dalam suatu laporan keuangan. Pemerintah pada dasarnya berfungsi sebagai pihak pengelola dana masyarakat diwajibkan untuk bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan daerah. Demi terciptanya peningkatan akuntabilitas pemerintah harus melakukan reformasi dalam penyajian suatu laporan keuangan, disamping itu pemerintah wajib dapat menyajikan laporan keuangan secara relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan serta harus dipublikasikan. Akuntabilitas dapat dibidang efektif ketika informasi yang terkait dengan pelaporan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat (Fauziah dan Nur, 2017). Jika sistem pemerintah ingin terlihat baik, maka pemerintah daerah harus memikirkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mendorong kinerja pemerintahan (Arifin dan Suryo, 2012).

Melihat hal tersebut maka TIK patut dijadikan sebagai alat yang bisa membantu untuk meningkatkan kontrol, akuntabilitas dan transparansi dengan cara menghubungkan orang, organisasi, kelompok, informasi dan pengetahuan (Maria dkk, 2017). Penggunaan TIK dapat membawa suatu informasi ke publik secara cepat dan mempermudah proses komunikasi antar instansi (Lindquist & Huse, 2017). TIK dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih dekat dan bisa mengontrol kinerja pemerintah sehingga pemerintah dapat bekerja secara efektif (Nurhakim, 2014).

Selama dua dekade terakhir, berjalannya *e-government* telah diakui oleh publik sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dikarenakan *e-government* dapat menjembatani kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (Al-Shbail & Aman, 2018). *E-government* dinilai sebagai hal positif sebagai penyalur cepat terhadap peningkatan kepercayaan pada pemerintah. Alasannya yaitu *e-government* menggunakan TIK sebagai alat untuk mensimulasi dan mendukung terciptanya tata kelola yang baik (Adam, 2020). *E-government* memberikan akses kepada masyarakat secara lebih luas, dan mampu meningkatkan keterbukaan, transparansi serta akuntabilitas dalam tindakan pemerintah (Halachmi dan Greiling, 2013) dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat memperkuat kepatuhan terhadap hukum dan kontrol terhadap pejabat pemerintahan (Al-Shbail & Aman, 2018). Dengan demikian *e-government* dapat dipandang sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan dapat mencapai reformasi administrasi publik yang diinginkan (Bataineh dan Abu-Shanab, 2016), salah satu unsur *e-government* adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi keuangan dari sini maupun organisasi dan menggabungkan metodologi, kontrol dan teknik akuntansi dengan teknologi serta informasi untuk transaksi dan menyediakan data pelaporan internal, laporan eksternal, laporan keuangan, dan analisis trend kemampuan untuk mempengaruhi kinerja organisasi (Maruta, 2017). Penerapan SIA dalam pemerintahan memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan

pemerintah melalui proses penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah (Syafarani dan Feryani, 2012).

Pujiswara dkk. (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah, yang memiliki arti bahwa ketika pemanfaatan SIA daerah semakin tinggi maka akan mengakibatkan peningkatan pada akuntabilitas daerah. Mahayuni dkk. (2017) juga menyatakan bahwa jika memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi keuangan daerah secara efektif maka akan berdampak pada terciptanya akuntabilitas. Ketika Sistem Informasi Akuntansi telah dimanfaatkan maka informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah bisa dipertanggungjawabkan dan dipublikasikan secara cepat melebihi sebelumnya, dengan demikian maka akan dapat mempengaruhi akuntabilitas baik secara vertikal maupun horizontal. Dijelaskan juga dalam penelitian Perdana (2018) bahwa ketika teknologi informasi dimanfaatkan maka akan mempengaruhi akuntabilitas. Hasil penelitian penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andri (2013) yang menjelaskan bahwa adanya pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun tidak selamanya It dapat berkontribusi untuk meningkatkan akuntabilitas, dapat dilihat pada table 1.1 mengenai nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kabupaten Sleman tahun 2015-2020

TABEL 1.1
 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kabupaten Sleman
 2015-2020

Tahun	Nilai Akuntabilitas
2015	76,90
2016	77,89
2017	78,06
2018	81,72
2019	81,99
2020	81,42

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 Nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas ditunjukan bahwa Tingkat akuntabilitas setiap tahunnya meningkat namun terdapat penurunan ditahun 2020. Pada tahun tersebut sedang terjadi peningkatan penggunaan teknologi informasi, namun nilai akuntabilitas mengalami penurunan. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak selamanya IT dapat mendorong terjadinya Akuntabilitas.

Hal tersebut sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, menurut penelitian Enggar dkk. (2020) yang menemukan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sadjono & retnowardhani (2019) juga menemukan bahwa dalam beberapa kasus tertentu teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum dijalankan oleh pegawai secara maksimal dapat mempengaruhi akuntabilitas (Enggar dkk, 2020). Chae dkk. (2014) menyarankan untuk memeriksa apakah suatu organisasi telah dilengkapi dengan keterampilan yang memadai untuk memanfaatkan aset teknologi informasi untuk kebutuhan bisnisnya. Beberapa hasil studi menemukan

bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas, tetapi juga ditemukan pada konteks tertentu bahwa teknologi informasi tidak selalu berkontribusi, hal ini bisa jadi disebabkan oleh perbedaan perusahaan serta *Human Resource* karena keberhasilan teknologi informasi untuk mendorong kinerja/akuntabilitas bergantung kepada Seberapa jauh teknologi informasi dapat diterima oleh penggunanya. Naviera (2019) menjelaskan bahwa kinerja dan perilaku seseorang dalam menggunakan teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh *Self-efficacy* dan *Computer anxiety* .

Surya dkk. (2018) menjelaskan bahwa *Self-efficacy* berkaitan dengan keyakinan seseorang tentang kemampuan mereka untuk menghasilkan suatu pencapaian yang telah diberikan. *Self-efficacy* diperlukan dalam pengembangan kinerja seorang karyawan karena dengan adanya *Self-efficacy* akan membantu individu dalam minumbuhkan rasa percaya diri atas kemampuan yang ia miliki untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya (Surya dkk, 2018). Ketika seseorang memiliki *Self-efficacy* yang tinggi mereka akan lebih mudah dalam menetapkan suatu tujuan dan akan selalu melakukan upaya yang terbaik untuk mewujudkan tujuan tersebut sehingga kinerja karyawan menjadi baik, sebaliknya ketika seseorang yang memiliki *Self-efficacy* yang rendah maka mereka cenderung mudah menyerah dan akan meninggalkan tujuan awal mereka setelah sedikit usaha sehingga kinerja menjadi jelek (Bandura, 2012). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) menjelaskan bahwa *Self-efficacy* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Trilolita dkk. (2017) menunjukkan bahwa *Self-efficacy* berpengaruh

signifikan terhadap kinerja karyawan. Ketika seseorang memiliki *Self-efficacy* tinggi maka akan mempengaruhi suatu kinerja yang lebih baik.

Harimurti dan Astuti (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif *Computer anxiety* dalam penguasaan komputer. Semakin tinggi tingkat *Computer anxiety* yang dimiliki mahasiswa maka akan terjadi penurunan dalam menggunakan komputer (Harimurti & Astuti, 2016). Heinssen dkk. (1987) dalam Naviera (2019) menyimpulkan bahwa ketika seseorang memiliki tingkat *Computer anxiety* yang tinggi maka akan mempengaruhi penurunan kinerja serta kepercayaan seseorang terhadap kemampuan diri sendiri. Sam dkk. (2005) pada Astuti dan Harimurti (2016) menemukan bahwa *Computer anxiety* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan diri pada mahasiswa akuntansi di Universitas Malaysia Sarawak (Unimas), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketika *Computer anxiety* semakin tinggi maka tingkat kepercayaan diri akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hatta dan Marietza (2013) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa *Computer anxiety* memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap keahlian pemakai (*user*) dalam mengoperasikan sebuah software, karena semakin tinggi *Computer anxiety* maka keahlian pemakai (*user*) dalam mengoperasikan sebuah software akan menjadi turun. Dengan penjelasan dari penelitian penelitian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa *Computer anxiety* dapat mempengaruhi keahlian dalam mengoperasikan software pemakai (*user*). Karena semakin tinggi *Computer anxiety* dapat memberikan pengaruh dan menurunkan tingkat keahlian pemakai (*user*) dalam mengoperasikan software.

Penelitian sebelumnya mengenai Peran Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas memang sudah banyak diteliti namun masih terdapat inkonsistensi hasil sesuai dengan Sofyani dkk. (2020) mencatat bahwa teknologi informasi tidak selalu menghasilkan manfaat bagi organisasi. Hal tersebut bisa terjadi karena faktor *Human Resource*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lee dkk. (2009) melakukan penelitian dalam konteks *E-commerce*, efisiensi merupakan cara kognitif untuk mencapai suatu tujuan dengan optimal (cepat dan tepat) sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Dapat dikatakan bahwa *Self-efficacy* dapat memoderasi hubungan antara penilaian situs Web (informasi situs web dan kepuasan sistem) dan upaya kognitif (efisiensi) yang telah diraskah oleh customer dalam situs web. Di sisi lain, *Computer anxiety* dapat mempengaruhi tanggapan afektif customer dalam sistus web, seperti kepuasan elektronik, hal tersebut dikarenakan reaksi afektif negatif terhadap penggunaan computer (Igbaria dan Chakrabarti, 1990). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kantor Pemerintah Daerah yang akan diteliti. Hal ini dikarenakan peneliti ingin meneliti apakah *Self-efficacy* dan *Computer anxiety* sebagai pemoderasi dapat meningkatkan atau menurunkan kinerja pada sektor publik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mengenai Akuntabilitas, *E-government*, Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Ditambah lagi terdapat ketidak konsistenan pada penelitian sebelumnya. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan **judul “Peran Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Organisasi Pemerintah Daerah Dengan *Self-efficacy* Dan *Computer anxiety* Sebagai**

Variabel Moderating (Studi Empiris Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta)”.

B. Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah kualitas Sistem Informasi Akuntansi berperan positif terhadap akuntabilitas pemerinta daerah?
2. Apakah *Self-efficacy* memperkuat peran kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap akutabilitas pemerintah daerah?
3. Apakah *Computer anxiety* memperlemah peran kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah daerah?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis *Self-efficacy* memperkuat peran kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisis *Computer anxiety* memperlemah peran kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi masukan atau referensi sekaligus sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian objek atau masalah yang sama.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini merupakan suatu pendalaman ilmu, dimana peneliti menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah dan menghubungkannya dengan karyawan yang sebenarnya. Sehingga dapat menambah pemahaman penulis dalam bidang khususnya Akuntans Sektor Publik.

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sebagai bahan penambahan pengetahuan mahasiswa dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan salah satu sumberinformasi yang dasar penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Literatur

- a. Manfaat literatur penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait kualitas SIA, *computer anxiety*, dan *self-efficacy* dalam menunjang akuntabilitas pemerintah daerah.

3. Manfaat Praktik

a. Bagi Pemerintah

Secara praktik hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dengan memperhatikan TI dan kualitas SIA.